

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh :

SAHRIL BOLI

NIM. 2017210136

**KONSENTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Tanggung jawab adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan memaknai presentasi dan kegiatan seorang individu atau pimpinan suatu perkumpulan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kedudukan untuk meminta data atau tanggung jawab. Studi ini berencana untuk mengkaji atau menyelidiki bagaimana pemerintah kota mengawasi perbaikan kota. Pemeriksaan semacam ini menggunakan eksplorasi subjektif, alat pemeriksaannya adalah analisis itu sendiri. Strategi pengumpulan informasi dibantu melalui wawancara dengan empat saksi, persepsi dimulai pada 17 Juni 2021 - 17 Juli 2021. Sedangkan pemeriksaan informasi yang digunakan adalah penyelidikan informasi model intuitif yang terdiri dari pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan. Penanggung Jawab Pemerintah Kota yang sedang dikembangkan administrasinya dilengkapi dengan pertimbangan penyusunan kemajuan sehingga tersistem dalam RPJM, RPJP dan RKP kota dimana pencapaian-pencapaian yang terukur dikoordinasikan untuk mencapai visi pemahaman peningkatan bantuan pemerintah daerah. Tahap pelaksanaan perbaikan didorong dengan memberikan rasa kewajiban kepada daerah sebagai dukungan dengan tujuan bahwa pelaksanaan perbaikan merupakan kebutuhan bersama. Pengelolaan hasil kemajuan dilakukan dengan memberikan open data rencana perbaikan dan data hasil kemajuan, melalui data ini, tanggung jawab pemerintah kota kepada perkumpulan luar sangat penting untuk kewajiban etis pelaksanaan kemajuan di Kota Tlekung.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa dan Pengelolaan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan adalah proyek pasca-perbatasan yang diharapkan dapat mencapai kemajuan suatu lokal. Pada dasarnya, kemajuan dicirikan sebagai pekerjaan untuk mengubah, berdasarkan apa yang tidak bagus, menjadi besar, sebuah pekerjaan untuk bekerja pada kehidupan moneter, politik, sosial, dan fondasi daerah menurut Fakhri di Halim. (2020: 1). Tanggung jawab publik dapat dianggap sebagai suatu siklus atau sistem di mana perwakilan atau asosiasi publik dapat didukung jika cara mereka berperilaku dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang umumnya diharapkan oleh Mulgan dalam Amir (2019: 85). Hubungan nyaman antara eksekusi yang diharapkan, tingkat tanggung jawab organisasi publik sulit untuk disadari. Estimasi pameran asosiasi publik masih diliputi oleh penanda asli seperti hasil, kecakapan, kelangsungan hidup, dan efisiensi karena dianggap memenuhi pedoman administrasi, khususnya korelasi antara biaya yang dikeluarkan dan jumlah administrasi atau administrasi publik yang dibuat.

Sumber pembayaran kota biasanya digunakan untuk membiayai semua spesialis yang menjadi kewajiban kota. Aset-aset ini digunakan untuk mensubsidi penyelenggaraan pemerintahan kota yang meliputi administrasi, pembangunan, penguatan wilayah dan wilayah setempat. Selanjutnya, town pay yang diperoleh dari APBN juga digunakan untuk membiayai kekuasaan ini.

Perbaikan pondasi belum merata, namun hanya di wilayah metropolitan. Bidang utama perbaikan kerangka dilakukan oleh Bagian Pekerjaan Umum (PU), Tata Air dan Jalan Tol Kota Batu. "Oleh karena itu, panitia meminta kepada PU, dinas tata air dan perbaikan wilayah setempat

untuk lebih fokus pada pondasi jalan dan tata air di daerah pedesaan,” kata Nurohman, (Kabar24.com. 2020)

Perbaikan yang terjadi di Kota Tlekung masih belum dirasakan oleh kelas pekerja setempat. Hal ini tergantung pada persepsi awal ketika para ahli berencana menanyakan perkembangan daerah yang terjadi di Kota Tlekung dari jawaban atas masalah yang berkaitan dengan kerangka kemajuan yang sebenarnya belum membaik karena ada unsur penghambat seperti yang mungkin kita ketahui sebelumnya, khususnya (Covid). Penyelenggaraan pembenahan kota yang belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kota telekung merupakan catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah kota Tlekung. Perbaikan kota direncanakan dengan tujuan agar jaringan pedesaan dapat menyesuaikan dengan kemajuan mekanis, baik data, aset, dll seperti jaringan metropolitan.

Sang pencipta tertarik untuk mengarahkan penjelajahan di Kota Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kota Dewan, di Kota Tlekung, Kawasan Junrejo, Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan pembangunan desa, di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa, di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas dan menganalisis bagaimana pemerintah desa pada pengelolaan pembangunan desa, di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa, di Desa Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik:

Secara skolastik, eksplorasi ini bermanfaat untuk memberikan data, referensi, dan komitmen skolastik terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Peningkatan Kota Para pelaksana, di Kota Tlekung, Kawasan Junrejo, Kota Batu.

2. Manfaat Praktis:

Semata-mata, penjelajahan ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi untuk masa depan Pemerintah Kota dan kelompok masyarakat Kota Junrejo dalam hal Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pembangunan Kota Dewan di Kota Tlekung, Kawasan Junrejo, Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, A. A. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*. Jurnal Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
- Adrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, *Pengelolaan keuangan desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 41-42
- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4
- Astuty, Elgia (2013). “*Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)* (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. E-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
- Basri, H. (2016). *Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Vol. 3, No 1, Hal 30-38
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 12
- Farasmy, Nurul (2016). *Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat* Kecamatan Mamuju serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Mamuju. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No.3, Hal 1-11
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Ibid., hal. 23-24
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/desa>.diakses pada tanggal 10 Juni 2019
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 233-234

- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.*, hal. 240.
- Nurodin, I. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Surade.* Jurnal Ilmiah Ekonomi
- Prayudi, P. A. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Seririt).* e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 8 No: 2
- Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan.* (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 2
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.342
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi,* hal. 243
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa,* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 27
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa,* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa,* hal. 22
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Sebelah Maret Surakarta; University Press. Surakarta
- Suriya Malang. (2019) *Dana Desa Untuk Kota Batu.* Diakses melalui <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/04/10/pencairan-dana-desa-untuk-dua-desa-di-kota-batu-terganjal-siskeudes>
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi).* Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Tiwinarni. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Wibisono, H. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1